

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- As'Adi, Edi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (SDR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaa Republik Idonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendra Winarta, Frans,2012,*Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. , 1991, *Sosiologi Jilid I Edisi Keenam*, Erlangga.
- H. Sudiarto, Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Raja Drafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1973, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Lusia Ekawati, Evy, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara*, Genta, Yogyakarta.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud. MD, Moh, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Prakoso, Djoko, dan Murtika, I Ketut, 1987, *Mengenal lembaga kejaksaan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Setyo wahyudi, Bambang, *Jaksa Pengacara Negara : Mengawal Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, 2016, CV. Sapta E. Persada, Palembang.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Strategi Penyelamatan Kekayaan Negara Melalui Penegakan Hukum*, UNS Press, Surakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Peran Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Pemulihan dan Penyelamatan Kekayaan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Pidato Pengukuhan Penganugerahan Doktor Kehormatan Honoris Causa dalam Bidang Hukum Universitas Sebelas Maret*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Suhadibroto, 1994, *Profil Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Suharto, Hari, *Lima windu sejarah kejaksaan republik indonesia 1945 - 1985*
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supranto. J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Taniredja, Tukiran, 2012, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), staatsblaad tahun 1847 nomor 23 tentang Burgelijk Wetboek voor Indonesie ( BW ).



Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187.

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253.

Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERJA RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan tata kerja kejaksaan RI

PERJA RI Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara



PERJA RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

KEPJA RI Nomor :KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi perkara perdata dan tata usaha Negara.

Pengarahan Jamdatun Kejaksaan Agung RI dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2011, Kejaksaan Agung RI, 2011.

**Tesis :**

Evi Lusia Ekawati, 2011, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta*, Magister Hukum UGM, Yogyakarta.

Bekti Wicaksono, 2014, *Kajian Yuridis Kewenangan Kejaksaan sebagai Pemohon Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Magister Hukum UGM, Yogyakarta.